



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SANG MADE MAHENDRA JAYA**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN KESATUAN BANGSA**
3. NHK : **191692**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.156.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 475 m2/185 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 845.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 39 m2/73 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 920 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 308.200.000
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 301.500.000
5. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 301.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **896.500.000**

1. MOTOR, PIAGGIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
2. MOBIL, HYUNDAI PALISADE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HILUX 3.OG DOUBLE CABIN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **965.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **465.509.030**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **520.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 5.003.209.030

III. HUTANG

Rp. 363.308.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.639.900.530

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.